



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJA SAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTOYO
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJA SAMA
3. NHK : 113211

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.353.708.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 517.740.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 183.060.000
3. Tanah Seluas 1779 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.632.000
4. Tanah Seluas 3600 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1800 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.776.000
6. Tanah Seluas 369 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1057 m2/40 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
8. Tanah Seluas 2000 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 262.500.000
9. Tanah Seluas 200 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
10. Tanah Seluas 300 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
11. Tanah Seluas 200 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 147.000.000**



1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, IZUSU PANTHER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	56.456.868
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.557.164.868
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.557.164.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.